

Perdamaian Antarwarga Terus Diupayakan

KOMPAS(Nasional) - Jumat, 02 Nov 2012 Halaman: 1 Penulis: **HAR; HEI; CAL; COK; ONG; ABK; AYS** Ukuran: 3327 Foto: 1



Konflik Lampung

Perdamaian Antarwarga Terus Diupayakan

Jakarta, Kompas — Kepolisian Negara RI terus memfasilitasi pertemuan antarwarga beberapa desa yang bertikai di Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Upaya tersebut bertujuan mewujudkan perdamaian menyusul konflik sosial yang menewaskan 14 orang pada Minggu dan Senin lalu.

Demikian diungkapkan Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Inspektur Jenderal Suhardi Alius saat berkunjung bersama Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigadir Jenderal (Pol) Boy Rafli Amar ke Redaksi Kompas di Jakarta, Kamis (1/11).

”Kami terus memfasilitasi berbagai pertemuan agar segera terwujud perdamaian. Sampai sekarang komunikasi masih terus berjalan. Sebab, jika itu terjadi (penolakan perdamaian), bisa merupakan preseden buruk,” kata Suhardi.

Pertikaian itu melibatkan warga Desa Agom, Kecamatan Kalianda, dan Desa Balinuraga, Kecamatan Way Panji. Desa-desa di sekitarnya turut terimbas, seperti Patok dan Sidoreno.

Suhardi mengatakan, selain menjaga stabilitas keamanan di desa-desa tersebut, Polri juga terus membuka ruang komunikasi dan membangun perdamaian.

Jero Gede Bawati (59), tetua masyarakat Desa Balinuraga, menyesalkan masalah kecil yang kemudian menyulut kerusuhan. ”Pemerintah harus bisa mengambil keputusan yang adil bagi dua pihak yang bertikai,” ujarnya.

Bawati yang tinggal di Balinuraga sejak tahun 1963 menambahkan, warga di desa-desa tersebut sebetulnya pernah hidup berdampingan. ”Di awal masa transmigrasi di Balinuraga, antarwarga saling bantu. Keharmonisan itu harus bisa dikembalikan,” ujarnya.

Pengungsi

Kemarin, warga yang mengungsi di Sekolah Polisi Negara (SPN) Kemiling, Bandar Lampung, kesulitan air bersih. Jika kondisi ini terus berlangsung, dikhawatirkan mereka terjangkit diare.

Para pengungsi ditampung di empat aula. Setiap aula dihuni sekitar 400 orang. Terdapat 20 kamar mandi yang tak memadai untuk mereka.

Ajun Komisaris Besar Harseno, petugas di pengungsian, mengatakan, daerah itu termasuk area yang sulit air. Selama ini, untuk kebutuhan 186 siswa SPN, tak cukup dengan menggunakan air dari PDAM sehingga terpaksa dibuat sumur bor.

Kemarin sore, jumlah pengungsi berangsur berkurang, dari 1.700 menjadi 1.410 orang. Sebagian telah dijemput keluarga.

Anggota Komisi I DPR, Helmy Fauzi, menilai, merebaknya sejumlah konflik horizontal di beberapa daerah belakangan ini menunjukkan masih lemahnya kapasitas dan koordinasi intelijen.

Peneliti Kepala Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian Universitas Gadjah Mada, Rizal Panggabean, berpendapat, permulaan konflik di Lampung sepatutnya dideteksi sejak dini. Konflik ini muncul sejak Januari lalu, lalu Agustus, dan Oktober.

(HAR/HEI/CAL/COK/ONG/ABK/AYS)

Lihat Video Terkait "Ngaben Warga Balinuraga di Lampung Selatan" di vod.kompas.com/ngabenwargalampung

BACA JUGA HAL 21

Image :

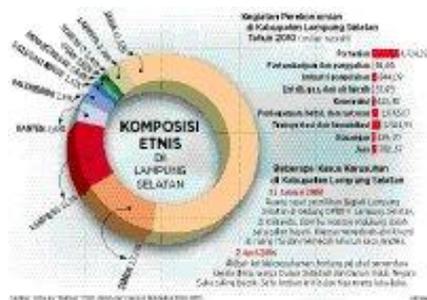
KOMPAS/HERLAMBANG JALUARDI

Keluarga dari salah satu korban konflik antarwarga desa menghancurkan abu setelah dikremasi di Krematorium Yayasan Bodhisattva, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran, Lampung, Kamis (1/11). Untuk selanjutnya, abu tersebut dilarung ke laut. Sebanyak sembilan jenazah korban kerusuhan dikremasi di tempat itu. Acara itu disaksikan sekitar 60 pengungsi yang merupakan keluarga dari korban, dan dikawal polisi.

http://pik.kompas.co.id/piknetprabayar/tark_detail.cfm?item=3&startrow=1&style=advanced&session=1365662041674

Kasus Lampung: Harus Bangkit Bangun Potensi

KOMPAS(Nasional) - Jumat, 02 Nov 2012 Halaman: 21 Penulis: Pascal S Bin Saju; HEI
Ukuran: 5751 Infografis: 1



kasus lampung

Harus Bangkit Bangun Potensi

Pertikaian dua hari, Minggu dan Senin (28 dan 29 Oktober), telah terjadi antara warga Desa Agom, Kecamatan Kalianda, dan Desa Balinuraga, Kecamatan Way Panji. Beberapa desa di sekitarnya, antara lain, Desa Patok dan Sidoreno, Way Panji, terkena imbas. Hari Rabu (31/10) situasi di Pasar Patok berangsur Pulih. Balinuraga dan sebagian Sidoreno masih lengang.

Oleh Pascal S Bin Saju

Konflik komunal atau kerusuhan sosial seperti itu bukan yang pertama kali terjadi di Lampung Selatan. Sejak tahun 1990-an hingga kini, sudah lima kasus serupa, seperti disampaikan dosen FISIP Unila, Hartoyo. Namun, belum setahun pertikaian terakhir, kini muncul lagi konflik serupa.

Tahun 2012 adalah tahun kekerasan bagi Lampung Selatan. Pada 24 Januari, pernah terjadi konflik komunal serupa melibatkan warga Desa Kotadalam dan Desa Napal, Kecamatan Sidomulyo. Warga lima marga di Kotadalam membakar hampir 100 rumah di Napal hingga ratusan keluarga mengungsi.

Ada rumah yang rusak di Napal belum selesai dibangun meski sebagian sudah berdiri ketika insiden Wai Panji muncul. Di gapura Desa Napal, satu regu marinir bersiaga penuh, Kamis (1/11) petang. Rumah sepi penghuni karena mengungsi.

Ikatan rapuh

Napal, Balinuraga, dan sebagian Sidoreno dihuni etnis Bali, yang oleh etnis lokal Lampung Selatan disebut "pendatang". Isu "pendatang" dan penduduk "lokal" belum pernah muncul separah ini pada tahun-tahun sebelumnya. Masalah ini timbul karena tali ikatan sosial rapuh.

Selang tiga bulan setelah peristiwa Napal, terjadi kerusuhan sosial di Kalianda. Ribuan orang, pada 30 April, berunjuk rasa ke kantor bupati dan membakar patung Zainal Abidin Pagarlam (ZAP) yang berdiri di jalan masuk kota itu, tepat di sisi jalan lintas Sumatera.

Menurut saksi mata, aparat pemda dan polres setempat berupaya memediasi, tetapi tidak digubris.

Massa menolak patung mantan Bupati Lampung Selatan dan mantan Gubernur Lampung itu. ZAP adalah ayah Gubernur Lampung Sjachroedin ZAP dan kakek kandung Bupati Lampung Selatan Rycko Menoza ZAP.

Ketika Kompas mengunjungi kota itu hari Rabu, fondasi di mana patung itu dahulu didirikan masih ada, namun compang-camping. Warga menuturkan, saat kerusuhan, leher patung diikat pakai tali dan ditarik oleh kendaraan besar hingga roboh. Kepalanya dipotong.

ZAP hendak dijadikan ikon Lampung Selatan. Rycko tidak hanya mendirikan patung kakeknya, dia juga mengganti nama Jalan Kolonel Makmun Rasyid, tokoh pejuang Lampung Selatan, dengan nama ZAP. Perubahan nama jalan mengecewakan sebagian rakyat.

Terkait insiden terbaru di Way Panji, ada yang mengejutkan. Selain meremehkan kapasitas dan kepedulian Menoza dalam meredam gejolak, para tokoh Lampung Selatan menolak berdamai dengan warga Balinuraga dan sebagian warga Sidoreno dari etnis Bali. Warga Bali lebih dari 70 tahun menetap di wilayah itu mengikuti program transmigrasi.

Kalianda ialah kota kecil yang menjadi etalase Lampung Selatan. Hampir 60 persen penduduk adalah pribumi yang sudah menetap ratusan tahun yang disebut Lampung Peminggir. Sisanya pendatang dari Bali, Jawa, Banten, dan sebagian Sumatera.

Di kota kecil paling selatan Sumatera ini sering terjadi pergolakan sosial, tetapi semakin intens setahun ini. Dahulu lebih karena persoalan tanah atau lahan perkebunan. Kini pemicunya pun hal sepele. Insiden Napal dipicu perebutan lahan parkir. Kasus Way Panji karena kenakalan remaja: dua gadis Agom pengendara sepeda motor dihadang pemuda Balinuraga bersepeda hingga mereka terjatuh.

Persoalan sepele

Mengapa persoalan sepele itu meletup menjadi masalah besar, yang justru meresahkan seluruh kawasan? "Nah, itu masalahnya. Mengapa dari dahulu jarang ada konflik. Kami sudah lama hidup berdampingan," kata M Zahri, Ketua Paguyuban Lima Marga Pesisir Lamsel di Kalianda.

Pemerhati masalah politik lokal, Syafarudin, yang juga dosen dan Ketua Laboratorium Politik Lokal dan Otonomi Daerah Fisip Universitas Lampung menjawab pertanyaan itu. Menurut dia, konflik yang pernah ada selama ini, yang terjadi secara horizontal dan vertikal itu tidak ditangani secara tuntas. Implementasinya rendah.

Contoh, dalam kasus Napal di Sidomulyo sebenarnya sudah berakhir damai. Bahkan semua pihak menandatangani naskah perdamaian. Tetapi, pecah lagi konflik serupa di Way Panji.

Hal sepele itu mudah meledak menjadi satu persoalan besar karena tidak maksimalnya peran pranata yang ada. Jika pranata keluarga berjalan, tetapi pranata sosial dan hukum tumpul, kelompok masyarakat cenderung main hakim.

Kalau saja persoalan sepele itu dapat diredam di keluarga, tentu saja tidak akan melebar. "Hal paling penting lagi adalah peran pemerintah lokal. Variabel kepemimpinan di pemerintah adalah hal paling penting. Contohnya, pada zaman Bupati Zulkifli Anwar, pernah terjadi konflik komunal serupa, tetapi karena gaya kepemimpinan dekat dengan masyarakat, pemimpin yang mengayomi, masalahnya dapat diredam sejak dini," kata Syafarudin.

Lampung Selatan itu ibarat "pelangi", indah karena berwarna-warni, tetapi masih ada garis pemisahannya. Pluralitasnya tersekat. Lampung Selatan harus dibangun menjadi "mozaik khatulistiwa". "Ada banyak yang berbeda, tetapi bisa menjadi satu yang indah, plural namun harmonis, melahirkan satu identitas bersama," katanya.

Peran itu belum banyak dilakukan pemerintah lokal selaku fasilitator dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Pemimpin harus hadir di tengah rakyat ketika ada letupan sekecil apa pun, dan menjadi tokoh yang dapat didengar dan mau mendengarkan, disegani. (HEI)

Grafik: Kegiatan Perekonomian di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2010 (miliar rupiah)

http://pik.kompas.co.id/piknetprabayar/tark_detail.cfm?item=4&startrow=1&style=advanced&session=1365662041689

Kompleksitas Konflik Lampung

KOMPAS(Nasional) - Sabtu, 03 Nov 2012 Halaman: 6 Penulis: Firman Noor Ukuran: 6775

Kompleksitas Konflik Lampung

Oleh Firman Noor

Munculnya berbagai kasus kerusuhan di beberapa tempat di Indonesia menunjukkan bahwa potensi konflik tak segera selesai dengan terbukanya keran demokratisasi. Dalam konteks Indonesia, Baladas Goshal (2004) telah memperingatkan, terlepas sisi positif yang dibawanya, demokratisasi juga memberikan peluang bagi meluasnya potensi konflik.

Belum lama ini konflik besar kembali terjadi. Kali ini menimpa Lampung Selatan, tepatnya di wilayah Kalianda. Dalam kasus ini, soal pelecehan seksual yang diduga sebagai pemicu konflik, yang telah menelan belasan korban jiwa ini, sebenarnya hanyalah puncak dari gunung es.

Dilihat dari akar penyebabnya, kasus Lampung—dalam batas-batas tertentu— dapat dikatakan bersifat klasik. Di dalamnya melibatkan tipe konflik yang bernuansa primordial, yang mengingatkan kita pada konflik yang terjadi di Sampit, Sambas, Kalbar, dan sejumlah daerah pascareformasi. Meski sebagian kalangan melihat konflik antarkampung di Lampung ini tak terkait masalah etnisitas, mengabaikan faktor ini juga kurang tepat. Hal ini mengingat secara kasat mata pihak-pihak yang berkonflik memiliki keterkaitan kuat dengan kedua etnis yang terlibat, yakni etnis Lampung dan Bali.

Sejak kehadirannya, etnis Bali—berbeda dengan orang Jawa—dipandang membawa persoalan tersendiri bagi sebagian masyarakat Lampung. Gugus persoalan ini mencakup "legitimasi kehadiran" masyarakat Bali yang dipandang masih bermasalah karena menempati wilayah yang belum sepenuhnya diizinkan ataupun karena perbedaan adat kebiasaan dan agama. Kenyataan pula bahwa kedua etnis relatif hidup terpisah dalam nuansa yang eksklusif (enclave). Tidak mengherankan jika kedua etnis itu kerap masih merasa asing satu dan lainnya. Hal ini terjadi terutama di Lampung Selatan dan Lampung Utara.

Meski secara kultural sebenarnya kedua etnis itu memiliki kearifan lokal yang dapat diandalkan untuk menciptakan kerukunan dan mencegah konflik, tetapi dalam berbagai kasus konflik terlihat bahwa kearifan lokal itu seolah sirna.

Masyarakat Lampung punya kearifan lokal berupa Piil Pesenggiri (Piil), yang di dalamnya terkait soal kehormatan diri yang muncul karena kemampuan mengolah kedewasaan berpikir dan berperilaku. Di sini kemampuan hidup berdampingan dengan berbagai kalangan, termasuk pendatang, merupakan salah satu inti ajaran Piil itu. Begitu juga masyarakat Bali dengan ajaran Bhinneka Tunggal Ika, Tatwam Asi (kamu adalah aku dan aku adalah kamu) dan Salunglung Sabayantaka, yang mengajarkan demikian dalam arti penting hidup berdampingan secara damai.

Situasi di Lampung ini cerminan bahwa nilai-nilai kearifan lokal makin terpinggirkan. Setidaknya mengalami pergeseran makna. Konsep Piil, misalnya, mengalami penyempitan makna sekadar membela harga diri. Alih-alih dikaitkan keharusan kedewasaan berperilaku, masalah "kehormatan diri" justru jadi alasan pembenaran untuk menempuh cara apa pun sejauh itu dianggap dapat menjaga

harga diri. Sementara respons dari kalangan Bali menunjukkan bahwa nilai-nilai kedamaian dan toleransi yang dianut juga tidak mampu bekerja dengan sempurna.

Tentu saja, persoalan primordial ini tidak berdiri sendirian. Dalam kasus Lampung, persoalan ini berkelindan dengan kenyataan adanya disparitas ekonomi, yang bagi sementara kalangan sudah makin terlihat nyata. Kaum pendatang, terutama Bali, merupakan komunitas yang cukup sejahtera, sementara etnis Lampung tidak cukup baik kondisinya sebagai "tuan rumah". Di sini, persoalan klasik kecemburuan sosial antara "pribumi" dengan "pendatang" telah cukup membutuhkan akal sehat dan menjadi rumput kering yang berpotensi membara manakala menemukan pemantiknya.

Di mana negara?

Lepas dari itu, kasus kerusuhan Lampung ini sebenarnya dapat segera tertanggulangi dengan baik jika aparat keamanan, dalam hal ini kepolisian, dapat memainkan peran yang lebih signifikan. Sebagai institusi yang menetapkan peran preventif (pencegahan) sebagai bagian tugas pokoknya, kepolisian seharusnya sejak dini dapat mendeteksi dan mengantisipasi potensi apa yang akan terjadi ke depan.

Dengan sederet institusi pelengkap untuk mendeteksi segenap potensi negatif yang ada di masyarakat, kepolisian jelas salah satu institusi yang seharusnya dapat memimpin dalam soal-soal yang terkait dengan keresahan masyarakat. Apalagi kenyataan bahwa kasus Lampung terakhir ini bukanlah kasus yang benar-benar baru sebab memiliki preseden di awal tahun ini yang cukup terang benderang.

Namun, justru di sinilah letak persoalan lain dari kasus Lampung—juga berbagai kasus konflik horizontal akar rumput lainnya—di mana peran aparat keamanan terlihat demikian kedodoran. Dengan demikian, tidak aneh jika kemudian masyarakat mempertanyakan kualitas SDM, efektivitas strategi atau bahkan komitmen dari aparat keamanan kita.

Persoalan lain adalah sikap pemerintah, khususnya pemerintah daerah, yang masih memercayakan kemampuan masyarakat dan tokoh-tokohnya dalam menyelesaikan persoalan konflik secara mandiri. Dalam hal ini resolusi konflik sebenarnya belum terlembaga secara memadai. Untuk itu, diperlukan upaya membentuk dan merevitalisasi lembaga-lembaga, baik adat maupun pemerintahan, yang terkait dengan persoalan primordial itu secara lebih serius. Tujuan utamanya jelas agar potensi konflik yang melibatkan unsur etnis dapat menemukan jalur penyelesaian secara lebih cepat, berkeadilan, dan komprehensif.

Solusi jangka pendek adalah segera menyelesaikan persoalan itu secara tepat, dengan sesedikit mungkin menimbulkan resistensi dari kalangan yang terlibat. Di sini diperlukan kerja sama banyak pihak. Tidak saja dari kalangan masyarakat, tokoh-tokoh, ataupun ormas, tetapi juga aparat dan pemerintah, termasuk pengadilan. Dalam perspektif manajemen resolusi konflik pihak ketiga, dalam hal ini pengadilan atau institusi yang dipercaya dapat memainkan peran itu, memainkan peran yang amat krusial. Kegagalan pada level ini kerap akan cenderung memberikan preseden negatif dan memperburuk situasi.

Dalam konteks jangka menengah, solusi yang mungkin adalah memperbaiki kinerja dan profesionalisme aparat keamanan agar dapat lebih sensitif dan efektif mencegah serta menyelesaikan rangkaian konflik sejak dini. Dibutuhkan pula sebuah desain besar dan pelembagaan pencegahan dan penyelesaian konflik yang lebih kontekstual dengan melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan dan masyarakat di dalamnya.

Dalam konteks jangka panjang, jelaslah bahwa persoalan segregasi primordial dan disparitas ekonomi

yang selalu jadi biang keladi kemunculan konflik harus dapat direduksi semaksimal mungkin.

Firman Noor

Peneliti Politik LIPI

http://pik.kompas.co.id/piknetprabayar/tark_detail.cfm?item=6&startrow=1&style=advanced&session=1365662510331

Konflik Lampung : Bangun Rekonsiliasi dari Bawah

**KOMPAS(Nasional) - Minggu, 04 Nov 2012 Halaman: 11 Penulis: COK; CAL; HEI
Ukuran: 3033**

Konflik Lampung

Bangun Rekonsiliasi dari Bawah

KALIANDA, KOMPAS — Semangat perdamaian terus diperlihatkan di berbagai lapisan sosial di Lampung guna menyikapi konflik komunal di Way Panji, Lampung Selatan. Meski begitu, belum tampak lagi upaya rekonsiliasi yang melibatkan tokoh lapis bawah di dua kelompok berseteru, kecuali diskusi dan dialog yang digelar di tingkat elite.

Ketua Paguyuban Lima Marga Pesisir Lampung Selatan M Zahri, Sabtu (3/11), di Kalianda menyatakan, perdamaian harus terus diupayakan untuk merekatkan lagi ikatan sosial antarpihak yang bertikai. Rekonsiliasi harus dibangun dari bawah, dari tokoh adat, pemuda, dan tokoh masyarakat Desa Balinuraga, Sidoreno, dan Agom.

”Dialog di tingkat elite penting. Namun, saya menilai, sebenarnya mengupayakan dialog damai yang melibatkan tokoh-tokoh paling bawah, mereka yang terlibat pertikaian, itu hal terpenting dalam proses ini. Misalnya mulai dari tokoh di lingkungan RT, RW, kepala desa, dan camat. Saya belum melihat itu berjalan lagi,” ujar Zahri.

Pertikaian komunal pecah di Balinuraga dan Sidoreno, juga melibatkan warga Agom yang menewaskan 14 orang, pada Minggu dan Senin lalu. Ratusan rumah rusak dan dibakar. Kerugian ditaksir miliaran rupiah. Sekitar 2.000 orang harus mengungsi di Sekolah Polisi Negara di Bandar Lampung.

Upaya untuk mempertemukan tokoh-tokoh desa sempat dilakukan pada Selasa dan Rabu lalu di Kalianda. Prakarsa Bupati Lampung Selatan Rycko Menoza, Kepala Polda Lampung Brigadir Jenderal (Pol) Jodie Rooseto, dan Komandan Korem 043 Garuda Hitam Kolonel CZI Amalsyah Tarmizi gagal mendamaikan para tokoh. Tokoh-tokoh Lampung Selatan menolak.

Sejak itu, upaya terus dicoba, antara lain, oleh Polri dan instansi pemerintah terkait. Menurut Zahri, tidak akan ada efeknya jika upaya damai itu tidak datang dari dan melibatkan tokoh pemuda, masyarakat dan tokoh agama, atau lembaga swadaya masyarakat desa di tiga desa yang bertikai itu, yakni Balinuraga, Agom, dan Sidoreno.

Kemarin juga digelar diskusi bertajuk ”Damailah Lampungku” di sebuah kafe dan restoran di Bandar Lampung. Hadir antara lain anggota Komisi III DPR, Aziz Syamsuddin, Tarmizi, tokoh Bali di Lampung, I Made Bagiase, dan beberapa tokoh Lampung lain.

Keinginan untuk kembali ke rumah semakin menyelimuti para pengungsi. Mereka memikirkan tempat tinggal, perabot rumah tangga, dan musim tanam yang sudah dimulai. Beban pikiran itu menyebabkan pengungsi menderita berbagai penyakit.

”Kami tak terbiasa menganggur. Di sini tidak ada yang kami kerjakan. Duduk-duduk saja dapat makan. Kami bosan,” ujar Sukarni (60), pengungsi.

Gubernur Bali Made Mangku Pastika di Denpasar mengajak masyarakat di provinsi itu tidak terpancing isu atau provokasi yang mengarah tindakan anarkisme dalam menyikapi konflik antarwarga di Lampung Selatan. ”Kita semua prihatin dan solider, tetapi jangan terpancing isu atau tindakan anarkisme. Kita mendukung langkah-langkah perdamaian,” ujarnya.(COK/CAL/HEI)

http://pik.kompas.co.id/piknetprabayar/tark_detail.cfm?item=9&startrow=1&style=advanced&session=1365662510378

Ajak Pendapat "Kompas": Pemerintah Tidak Mengelola Keragaman

KOMPAS(Nasional) - Senin, 05 Nov 2012 Halaman: 5 Penulis: BI PURWANTARI Ukuran: 7398 Infografis: 1



Jajak Pendapat "Kompas"

Pemerintah Tidak Mengelola Keragaman

Keberlangsungan masyarakat majemuk seyogianya dilandasi sikap saling menghormati dan penciptaan kehidupan yang setara. Publik menilai, sejumlah kebijakan pemerintah bukan saja mengingkari mozaik keragaman, tetapi juga berakibat turut memicu konflik sosial.

Oleh BI PURWANTARI

Hasil jajak pendapat Kompas pekan lalu mengungkapkan satu dari dua responden menyuarakan kegagalan pemerintah mencegah potensi konflik sosial yang terjadi di masyarakat. Secara lebih spesifik publik menilai empat hal terkait kegagalan tersebut. Dalam hal menjaga dan merawat gagasan kebinekaan, lebih dari separuh bagian responden menyatakan ketidakpuasannya terhadap pemerintah.

Proporsi yang lebih besar menyuarakan ketidakpuasan terhadap upaya pemerintah mencegah ancaman kerukunan hidup beragama dan potensi konflik etnis. Bahkan, tiga dari empat responden menyatakan secara lugas pemerintah gagal menegakkan hukum dan keamanan secara konsisten.

Opini serupa telah disuarakan publik jajak pendapat Kompas pada September tahun lalu. Tampaknya belum ada perubahan berarti dalam pencegahan potensi konflik di masyarakat.

Ekspresi ketidakpuasan publik terhadap upaya pemerintah tersebut sekaligus mengidentifikasi sejumlah faktor yang turut menyuburkan potensi konflik di masyarakat. Sebanyak 86,9 persen responden menyebut kesenjangan ekonomi yang akut dan kemiskinan turut menyuburkan potensi konflik di masyarakat. Di samping itu, lebih dari tiga perempat bagian responden mengungkapkan, penegakan hukum yang lemah kepada pelaku tindak kekerasan sebagai faktor signifikan yang menyuburkan potensi konflik horizontal.

Lebih jauh, mayoritas responden juga menyebutkan kekosongan figur pemimpin yang secara tegas berani menghargai perbedaan sebagai faktor penting lainnya yang turut menyuburkan konflik. Faktor terakhir yang tak kalah penting adalah tak adanya figur pemimpin yang bisa menjadi simbol pemersatu. Pendapat ini dilontarkan oleh tujuh dari sepuluh responden survei ini.

Mengingkari keragaman

Dalam sebuah masyarakat majemuk seperti Indonesia, mozaik keragaman merupakan realitas. Seluruh bangunan kebangsaan dan kehidupan masyarakat dibangun di atas landasan adanya perbedaan antarkelompok masyarakat. Persoalannya adalah bagaimana mengelola perbedaan tersebut menjadi sebuah kekuatan bagi terbentuknya multikulturalisme.

Publik survei ini menilai, alih-alih mengelola keragaman melalui sejumlah kebijakannya, pemerintah justru mengingkari perbedaan dan menyediakan lahan bagi tercetusnya konflik sosial. Berbagai kebijakan di bidang relasi antarumat beragama, misalnya, ditengarai publik telah ikut membakar potensi konflik di masyarakat.

Sebanyak 84,8 persen responden menyebutkan, sikap pembiaran pemerintah terhadap pelaku kekerasan berbasis agama telah ikut memacu konflik sosial. Beberapa contoh bisa disebutkan di sini seperti kekerasan terhadap warga penganut Syiah di Madura dan kekerasan terhadap jemaah Ahmadiyah. Tindakan main hakim sendiri tersebut menurut enam dari sepuluh responden diberi bahan bakar oleh keputusan pemerintah terhadap Ahmadiyah dan Syiah di Madura.

Fatwa sesat terhadap kedua kelompok minoritas tersebut dinyatakan lebih dari separuh responden sebagai sikap mengingkari keragaman serta menyerang hak memeluk keyakinan dan beribadah warga negara yang dijamin konstitusi, yakni Pasal 28E Ayat 1 dan 2 UUD 1945. Bahkan, menurut separuh bagian responden, Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tentang Pembangunan Rumah Ibadah telah ikut berpotensi memunculkan konflik horizontal. Penutupan sejumlah tempat ibadah kelompok minoritas di provinsi Aceh dan berlarut-larutnya pengurusan izin pendirian rumah ibadah di sejumlah wilayah dikhawatirkan akan menciptakan lahan konflik baru.

Relasi masyarakat

Berbeda dengan pemerintah, di level masyarakat, menurut publik survei ini, masih terpelihara sikap-sikap toleran dan keinginan mempertahankan mozaik keragaman. Lebih dari separuh bagian responden menyebutkan bahwa masyarakat masih sangat toleran menerima perbedaan etnis (68,6 persen) dan agama atau keyakinan (64,2 persen). Hal ini sebenarnya merupakan peluang untuk terus memperkuat hubungan sosial yang berbasis perbedaan. Namun, hal ini juga bisa berubah menjadi ironi karena lahan subur toleransi di masyarakat bisa semakin tergerus jika sikap pemerintah tak berubah.

Pola penyikapan yang berbeda muncul ketika publik survei menilai kesenjangan ekonomi di masyarakat. Menurut enam dari sepuluh responden, masyarakat lebih mudah bersikap intoleran terhadap perbedaan kelas sosial di masyarakat. Artinya, sentimen kelas sosial atau kesenjangan ekonomi lebih mudah memicu konflik di masyarakat.

Beberapa kerusuhan berdarah yang terjadi di Indonesia barangkali bisa dijelaskan dalam kerangka kesenjangan ekonomi atau perbedaan penguasaan atas akses sumber daya ekonomi. Kerusuhan antara etnis Dayak dan Madura di Sampit, Kalimantan, bukan hanya disebabkan bangkitnya identitas kelompok, tetapi juga disuburkan oleh tersisihnya etnis Dayak dari penguasaan politik-ekonomi selama puluhan tahun.

Konflik di Lampung Selatan yang terjadi minggu lalu pun bisa diteropong dari kerangka tersebut. Ketimpangan dalam penguasaan akses ekonomi antara etnis lokal dan pendatang sangat mungkin

menyuburkan potensi konflik akibat perbedaan etnis di wilayah tersebut.

Dalam proses meredam potensi konflik pun, masyarakat lebih memercayai lembaga informal ketimbang institusi pemerintah. Sebanyak 52,5 persen responden menyuarakan hal tersebut. Hal itu menunjukkan tingkat ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah dalam menyelesaikan konflik sosial. Sebaliknya, relasi dengan sesama institusi sosial masyarakat dianggap masih bisa membantu memperbaiki hubungan sosial.

Ilmuwan politik Kanada, Jacques Bertrand, menyatakan, negeri-negeri yang sedang berproses meninggalkan otoritarianisme sering kali mengalami konflik komunal. Kekerasan komunal merupakan "konjungtur kritis" bagi upaya memperbaiki relasi kekuasaan dan sumber daya. Artinya, kekerasan komunal menjadi alat negosiasi bagi perubahan kelembagaan kenegaraan dalam berbagai level. Setiap perubahan struktur kelembagaan politik kenegaraan akan berkontribusi pada polarisasi identitas etnik, agama, dan kelompok politik yang potensial memunculkan kekerasan (Amiruddin dalam Dignitas-Jurnal HAM, 2008).

Hal ini berarti kekerasan yang terjadi bukan semata-mata disebabkan masalah bangkitnya identitas kelompok. Dalam proses negosiasi perombakan hubungan kekuasaan dan penguasaan sumber daya, identitas akan dipakai sejauh relevan dengan kepentingan mendapatkan posisi politik dan penguasaan sumber daya ekonomi.

Dalam konteks ini, upaya negosiasi ulang dan terus-menerus antarkelompok yang berpotensi konflik menjadi prasyarat utama. Negara dan pemerintah lokal berfungsi menjembatani proses negosiasi ulang relasi tersebut. Hal itu juga berarti pemerintah harus mengelola perbedaan dan bukan mengingkari keragaman. Jika tidak, mozaik keragaman yang telah retak akan hancur berantakan.

(LITBANG KOMPAS)

Grafik:

1. Evaluasi terhadap Pemerintah
2. Opini tentang Masyarakat
3. Sejumlah Bentrok Antarwarga

"Ketimpangan dalam penguasaan akses ekonomi antara etnis lokal dan pendatang sangat mungkin menyuburkan potensi konflik akibat perbedaan etnis di wilayah tersebut."

http://pik.kompas.co.id/piknetprabayar/tark_detail.cfm?item=10&startrow=1&style=advanced&session=1365662510378

Dinamika Lampung: "Sai Bumi Ruwa Jurai", Semangat Kebinekaan

KOMPAS(Nasional) - Selasa, 06 Nov 2012 Halaman: 1,15 Penulis: PASCAL S BIN SAJU
Ukuran: 6466 Foto: 1



dinamika LAMPUNG

"Sai Bumi Ruwa Jurai", Semangat Kebinekaan

Sinar matahari meredup ketika dialog bertajuk "Damailah Lampungku" berakhir di kafe dan restoran Atmosphere, Bandar Lampung, Sabtu (3/11). Muncul tekad yang kuat untuk membangun perdamaian di Lampung, daerah yang dijuluki "Sai Bumi Ruwa Jurai" (satu bumi dua suku), dan mencegah konflik komunal terulang.

Oleh PASCAL S BIN SAJU

"Hari ini saya memenuhi dua acara pernikahan. Satu acara dengan adat Lampung dan yang lainnya dengan adat Sunda," kata Wahyu Sasongko, dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang berdarah Jawa, Minggu. "Mungkin besok dengan adat Bali atau Batak," celetuk seorang koleganya yang duduk agak jauh dari Sasongko.

"Lampung itu miniatur Indonesia," kata Sasongko. Di Lampung hidup beragam suku. Selain suku Lampung, juga ada Bali, Batak, Melayu, China, Padang, Sunda, Semendo (Sumatera Selatan), Banten, Madura, Bugis, dan yang paling banyak adalah suku Jawa. Bahkan, sebuah kelompok etnis yang kecil pun ada, yakni persatuan masyarakat Flores, Nusa Tenggara Timur.

"Mulai tahun 1963 sudah ada suku Bali sebagai 'orang Lampung' di Lampung Selatan. Kalau saya mengunjungi saudara di Bali, mereka bilang, kapan pulang ke Lampung lagi," kata I Made Bagiase, pengusaha dan tokoh Lampung berdarah Bali. "Artinya, kami tidak lagi diakui sebagai warga Bali, tetapi telah menjadi warga Lampung," ujarnya.

Apabila dilihat dari komposisi secara kuantitatif, sebenarnya penduduk asli yang disebut Ulun Lampung sekitar 19 persen, sesuai data menjelang Pemilu 2009, dari total jumlah penduduk di provinsi itu. Jumlah penduduk Lampung hingga pertengahan 2012 sekitar 7,6 juta jiwa. Karena yang paling banyak adalah etnis Jawa, pada suatu masa Lampung acap kali dijuluki "Jawa Utara".

Sejak Hindia Belanda

Kehadiran warga luar Lampung, selain karena ikatan perkawinan lintas etnis atau agama, juga karena ada perpindahan penduduk besar-besaran sejak zaman Hindia Belanda. Mereka bekerja dan

dipekerjakan di sektor perkebunan karet, kelapa sawit, singkong, dan tebu pada masa penjajahan dan berlanjut hingga kini.

Selain karena perpindahan mandiri atau inisiatif sendiri, migrasi itu juga karena digerakkan dengan sengaja oleh Pemerintah Hindia Belanda. Upaya mendatangkan buruh atau kuli perkebunan dari luar Lampung, terutama Jawa, secara besar-besaran dimulai tahun 1905 yang disebut program "kolonisasi" atau pada era kemerdekaan disebut "program transmigrasi".

Pada zaman kemerdekaan, setidaknya mulai tahun 1954, sudah ada penduduk Bali di Lampung. Khusus di Lampung Selatan, menurut catatan Made Bagiase, suku Bali secara resmi mulai eksis tahun 1963 dalam wadah keluarga besar Bali. Jumlahnya semakin banyak seiring dengan program transmigrasi yang terus digencarkan pada era Orde Baru.

Jika Sasongko menyebutkan Lampung sebagai "Indonesia mini", tentu karena ada fakta sejarah dan kondisi faktual saat ini. Karena itu, sangat disayangkan jika terjadi konflik komunal yang berulang di Lampung Selatan. Dalam terminologi Hartoyo, pemerhati masalah sosial dari Universitas Lampung, konflik terjadi karena soliditas atau ikatan sosial telah meredup.

Slogan Lampung

Lampung mempunyai moto yang selalu didengungkan oleh warganya dalam setiap kesempatan jika mereka berkumpul. Moto yang kini menjadi tagline provinsi di ujung selatan Sumatera itu ialah "Sai Bumi Ruwa Jurai", yang secara leksikal berarti satu bumi dua suku. Suku itu adalah Pepadun dan Saibatin, serta tidak mengenal istilah "lokal dan pendatang".

Slogan itu untuk memberikan satu kesadaran kepada masyarakat tentang adanya keberagaman. Ada satu (sai) bumi Lampung, dan di sana hidup secara berdampingan kelompok besar, yakni Ulun Lampung dan "pendatang".

Andy Achmad Sampurna Jaya, budayawan Lampung, dalam satu kesempatan mengatakan, Ulun Lampung memiliki falsafah hidup yang luar biasa gagah. Salah satunya terkait dengan tata hidup berdampingan satu sama lain dalam sai bumi Lampung, yakni falsafah nemui-nyimah dan nengah-nyampur. Falsafah itu mengajarkan kepada semua warga sai bumi untuk saling mengunjungi sebagai bagian dari bersilaturahmi, saling menghargai, dan ramah menerima tamu (nemui-nyimah), serta aktif dalam pergaulan bermasyarakat dan tidak individualistis (nengah-nyampur). Keduanya mengajarkan toleransi, pembauran, kebersamaan, harmonisasi, dan persatuan.

Falsafah itu, yang bersama tiga falsafah hidup lainnya, yakni piil-pusanggiri, juluk-adok, dan sakai-sambaian, termaktub dalam buku Kuntara Raja Niti. Piil-pusanggiri berarti malu melakukan pekerjaan hina dan memiliki harga diri. Arti juluk-adok memiliki kepribadian. Sakai-sambaian berarti bergotong royong dan saling membantu.

Lima falsafah itu disimbolkan dengan lima kembang penghias siger pada lambang resmi Provinsi Lampung. Kini di semua tempat usaha serta kantor pemerintah dan swasta di daerah itu dipasang siger. Bagi warga Lampung, dengan memasang siger saja meski tanpa dilekatkan dengan tagline "Sai Bumi Ruwa Jurai", semboyan itu seolah terpatrit di sana.

Sekretaris Pemerintah Provinsi Lampung Berlian Tihang menjelaskan, semula semboyan itu berbunyi "Sang Bumi Ruwa Jurai", yang berarti Lampung terdiri dari "pendatang dan penduduk lokal". Saat ini slogan itu diganti dengan sai bumi, yang berarti, semua warga yang mendiami Lampung adalah warga

Lampung yang satu, tidak ada lagi pemisahan.

”Warga Lampung ini satu. Sekarang ini telah ada kesepakatan untuk berdamai. Kami hanya hidup sekali, tidak dua kali. Mari kita bangun persaudaraan. Kita harus bersepakat, pertikaian yang baru saja berlalu merupakan kejadian terakhir dan tidak boleh terulang kembali,” kata Tihang di sela-sela penandatanganan kesepakatan damai di Bandar Lampung, Minggu lalu.

Baca Juga Konflik Lampung

Pengungsi Kembali Pulang HAL 22

Image :

KOMPAS/LUCKY PRANSISKA

Miri (kiri) mengais barang yang masih bisa diselamatkan di rumahnya di Desa Balinuraga, Kecamatan Way Panji, Lampung Selatan, Senin (5/11). Ia bersama 1.200 warga lain dipulangkan dari lokasi pengungsian di Sekolah Polisi Negara Polda Lampung dengan pengawalan petugas kepolisian. Warga yang kembali sementara tinggal di tenda sambil menunggu proses renovasi berlangsung.

http://pik.kompas.co.id/piknetprabayar/tark_detail.cfm?item=12&startrow=1&style=advanced&session=1365662510410

Situasi Lampung Selatan Terus Membaik

**KOMPAS(Nasional) - Rabu, 07 Nov 2012 Halaman: 23 Penulis: JON; BAY; EGI; INA; FER
Ukuran: 2966**

Dana Perbaikan Rumah Disiapkan

Situasi Lampung Selatan Terus Membaik

Kalianda, Kompas — Tim dari Kementerian Perumahan Rakyat turun ke Way Panji, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, untuk mendata dan menyalurkan dana rekonstruksi rumah warga yang rusak akibat bentrokan berdarah, pekan lalu. Situasi di Way Panji sendiri berangsur kondusif.

Tim yang terdiri atas enam orang itu bertemu dengan kepala-kepala banjar atau dusun dan menyosialisasikan mekanisme pencairan dana rekonstruksi rumah, Selasa (6/11).

Asisten Deputi Fasilitasi dan Pemberdayaan Komunitas Kementerian Perumahan Rakyat Poltak Sibuea, ketua tim itu, yang ditemui di Way Panji mengatakan, program bantuan rekonstruksi rumah korban konflik komunal di Lampung Selatan terdiri dari dua skema, yaitu besaran dana Rp 6 juta dan Rp 11 juta.

”Dana ini sifatnya perangsang. Warga yang kerugiannya di bawah Rp 11 juta mendapat Rp 6 juta, sedangkan yang kerusakannya Rp 11 juta ke atas mendapatkan Rp 11 juta,” ujarnya.

Menurut Poltak, anggaran dana ini sudah tersedia di kas Kementerian Perumahan Rakyat dan akan disalurkan pekan depan. Total dana yang disediakan untuk rekonstruksi rumah rusak di wilayah transmigrasi ini mencapai Rp 4,5 miliar. Itu digunakan untuk memperbaiki 411 rumah rusak di Desa Balinuraga dan Sidereno, Kecamatan Way Panji.

Selain rehabilitasi rumah rusak, melalui program sejenis, pemerintah pusat juga memberikan bantuan perbaikan rumah warga yang tidak laik huni di Way Panji. Total anggaran Rp 3,1 miliar untuk 561 rumah.

Kondusif

Di bawah pengawalan 4.000 personel TNI/Polri, kemarin, situasi di Way Panji berangsur kondusif. Warga mulai berani beraktivitas kembali, antara lain, membersihkan rumah yang rusak dan berladang. Aktivitas di pasar terdekat, yaitu Pasar Patok, berjalan normal kembali. Namun, siswa SD-SMP masih libur.

Aparat kecamatan, desa, serta TNI/Polri terus menyosialisasikan perdamaian. Kemarin, kegiatan difasilitasi Komandan Resimen Militer 043/Garuda Hitam Kolonel (Czi) Amalsyah Tarmizi.

Dalam kunjungannya di Lampung, kemarin, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan, pemerintah menaruh perhatian khusus terhadap konflik komunal. Untuk mencegah kejadian serupa terjadi kembali di Lampung dan daerah lain, diperlukan pemetaan dan identifikasi daerah rawan

konflik sosial.

Di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) Andreas A Yewangoe mengatakan, berbagai konflik yang terjadi belakangan ini di Indonesia harus membuat pemerintah bersikap lebih awas.

Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD meyakini, modal sosial masyarakat tetap terjaga dan akhirnya persatuan tetap terbangun kembali.

Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, mengirimkan 25 sukarelawan dan 250 tenda untuk para pengungsi, korban konflik di Lampung Selatan. Sukarelawan ini diberangkatkan kemarin, Selasa (6/11), oleh Ketua GP Ansor Kabupaten Magelang Chabibulah.

(JON/BAY/EGI/INA/FER)

http://pik.kompas.co.id/piknetprabayar/tark_detail.cfm?item=14&startrow=1&style=advanced&session=1365662510425